

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh :
SARAH SUNDARI SIDDIQ
NIM. 180801020**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 / 1444**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarah Sundari Siddiq
NIM : 180801020
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 03 September 2000

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karyaini.*

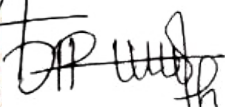
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda aceh, 26 Juli 2023

Yang menyatakan,




SARAH SUNDARI SIDDIQ
NIM. 180801020

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

SARAH SUNDARI SIDDIQ

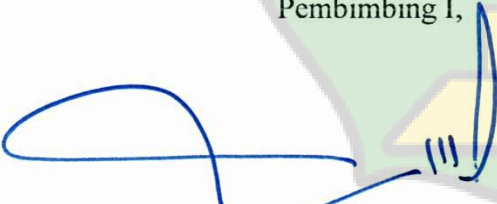
NIM. 180801020

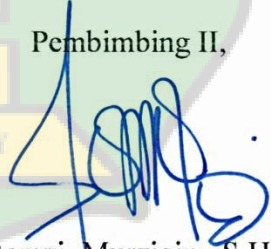
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Program studi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 198605132019032001

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

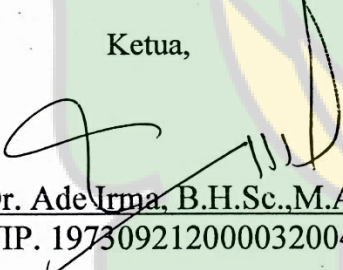
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari / Tanggal : Rabu / 26 Juli 2023
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

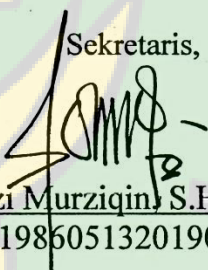
Ketua,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004

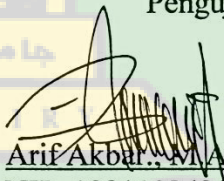
Penguji I,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Sekretaris,


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 198605132019031006

Penguji II,


Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Sarah Sundari Siddiq
NIM : 180801020
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan
Pembimbing I : Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
Kata Kunci : Strategi Pemerintah, Pemulihan Ekonomi, Covid-19.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2020 sejak masuknya virus corona di Indonesia dan menyebar diseluruh wilayah salah satunya Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menjelaskan adanya strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pada sektor-sektor yang terdampak covid-19. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi pada sektor kesehatan adalah : adanya penyuluhan kesehatan dengan memberi bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan memberikan anggaran bagi masyarakat yang terdampak covid-19 berupa anggaran gizi buruk untuk bayi, dan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan lansia. Selanjutnya strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi pada sektor perikanan adalah : memberikan belanja hibah bagi para nelayan berupa barang dan juga bantuan sosial berupa uang tunai untuk membeli kebutuhan kolam baik berupa bibit, pakan dan lainnya. Selanjutnya strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM adalah : Pertama ada program pembinaan kepada UMKM, kedua adanya penyuluhan untuk pendampingan UMKM. Ketiga adanya bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan BPUM dan bantuan dari pemerintah daerah disebut dana hibah. Dan selanjutnya strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata adalah: melakukan promosi pariwisata dengan mengikuti ajang perlombaan pesona Indonesia, dan memberi dorongan kepada pelaku UMKM untuk bergerak kembali meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan”**. Skripsi ini penulis ajukan untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT dan Baginda Rasulullah Muhammad SAW.
2. Terimakasih yang paling mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayah alm Marsiddiq dan Ibu Dasniar beserta keluarga besar yang telah mendoakan dan membantu penulis baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry

4. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku ketua prodi Ilmu Politik, Ramzi Murziqin, M.A, selaku sekretaris Prodi Ilmu Politik, Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku penasehat akademik dan beserta jajarannya.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A selaku pembimbing I dan Ramzi Murziqin, M.A, sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua. ::

Banda Aceh, 26 Juli 2023
Penulis,

Sarah Sundari Siddiq
NIM. 180801020

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Yang Relevan	11
2.2 Definisi Operasional	15
2.2.1 Pengertian Covid-19.....	15
2.3 Landasan Teori	18
2.3.1 Strategi Pemerintah.....	18
2.3.2 Pemulihan Ekonomi	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Informan Penelitian	27

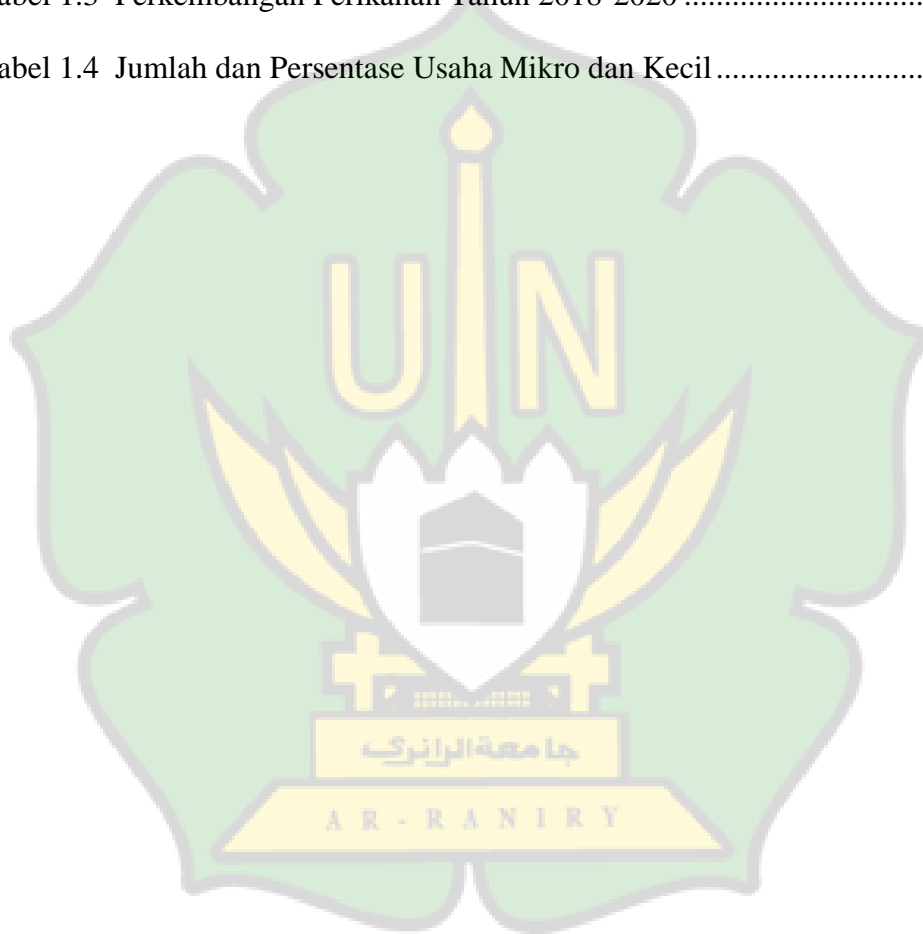
3.6	Teknik Pengumpulan Data	28
3.7	Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1	Profil Kabupaten Aceh Selatan	31
4.1.1	Sejarah Kabupaten Aceh Selatan.....	31
4.1.2	Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Selatan	32
4.1.3	Kondisi Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Covid-19	34
4.1.4	Kondisi Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Masa Covid-19	36
4.2	Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	38
4.2.1	Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Kesehatan.....	38
4.2.2	Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Perikanan	43
4.2.3	Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor UMKM	47
4.2.4	Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata.....	53
BAB V PENUTUP.....		57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
DAFTAR LAMPIRAN		63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komponen Strategi Publik	23
Gambar 1.2	Grafik Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 Kabupaten Aceh Selatan	38
gambar 1.3	Wawancara Dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.....	63
gambar 1.4	Wawancara Dengan Kepala Dinas Ukm Kabupaten Aceh Selatan	63
gambar 1.5	Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan	63
gambar 1.6	Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021	
Kabupaten Aceh Selatan	4
Tabel 1.2 Informan Penelitian.....	29
Tabel 1.3 Perkembangan Perikanan Tahun 2018-2020	45
Tabel 1.4 Jumlah dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia belum lama ini mengalami kepanikan dengan gemparnya virus mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebaran virus ini begitu cepat bahkan hampir seluruh dunia, tak heran hingga Indonesia pun merasakan dampaknya. Virus ini disebut, Virus Corona atau lebih dikenal dengan Covid-19. Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 dan menyebar ke seluruh wilayah.¹ termasuk di Provinsi Aceh salah satunya di Kabupaten Aceh Selatan.

Penyakit ini pertama kali muncul dan menyerang manusia di Wuhan, China pada 2019.² Gejala awal mirip dengan flu biasa. Gejala lain termasuk batuk, demam, kelelahan, sesak napas dan kehilangan nafsu makan. Virus corona berbeda dengan virus flu biasa. Virus berkembang sangat cepat terlebih kepada yang memiliki penyakit bawaan sehingga dapat menyebabkan infeksi yang lebih parah dan kegagalan organ bahkan menyebabkan kematian.³

Semakin hari jumlah orang yang positif terkena virus covid-19 semakin bertambah. Nampaknya virus covid-19 telah menjadi wabah pandemi yang cukup

¹Dani, Rahmaddian. (2021). Aktivitas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inhu.(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

²<https://stikesmasabdinusaplgl.ac.id/index.php/berita-terbaru/9-infeksi-virus-ini-disebut-covid-19-dan-pertama-kali-ditemukan-di-kota-wuhan>

³Nailul Mona, "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious(Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)". Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol. 2, No.2, 2020, h. 117

serius yang harus menjadi perhatian pemerintah. Sejak diumumkan adanya satu orang yang positif covid-19 pemerintah Indonesia telah membentuk undang-undang, termasuk pembentukan tim tugas untuk mempercepat penanggulangan penyebaran covid-19. Demikian pula di Aceh terutama di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah fokus dalam penanganan Covid-19.⁴

Pemerintah Negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan *lockdown* dan *social distancing* untuk mempercepat upaya menghentikan penyebaran Covid-19. Indonesia, negara terpadat kelima di dunia, tidak ketinggalan dalam mengambil langkah untuk memerangi Covid-19 dengan negara-negara lain di dunia, tetapi jenis tindakan di Indonesia disebut PSBB (pembatasan sosial berskala besar). PSBB sendiri bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, seperti *lockdown* dan *social distancing*.⁵

Kebijakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan gerak antar masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekonomi terhambat, bahkan ada yang terhenti. Dampak Covid-19 tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi ekonomi, dan berdampak lebih besar pada kehidupan sosial masyarakat.⁶

Dampak covid-19 terhadap perekonomian sangat dahsyat. Sejak diberlakukannya PSBB selain berhentinya aktivitas masyarakat juga berdampak

⁴<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2739> (diakses 23 Februari 2023, 15.12)

⁵Sutrisno, Edy. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektorUMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 641-660.

⁶Dani, Rahmaddian. (2021). Aktivitas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inhu.(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

pada ekonomi masyarakat bukan hanya di Indonesia melainkan diseluruh dunia mengalami penurunan signifikan. Berlakunya PSBB secara langsung telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba yang berdampak hampir diseluruh sektor.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi minus sebesar -2,37%, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh berkontraksi sebesar -0,27%, dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan juga berkontraksi sebesar -0,05%. Dibandingkan tahun 2019, Kabupaten Aceh Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi yaitu 4,43%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkontraksi secara signifikan dan turun drastis sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan anjlok, banyak usaha masyarakat yang tidak berjalan dengan baik, daya beli yang rendah, dan banyak kegiatan ekonomi yang macet hingga tutup.⁷

Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB laju PDRB mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 menjadi 0,05% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,43%. Kontraksi ekonomi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Aceh Selatan, namun juga dialami oleh hampir keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia bahkan dunia yang disebabkan oleh pandemi covid-19.⁸

⁷<https://thetapaktuanpost.com/kategori/pemerintah/kelesuan-ekonomi-dimasa-pandemi-covid-19-faktor-utama-menurunnya-pad-aceh-selatan/amp/> (diakses 23 Februari 2023, 07.35)

⁸ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Selatan

Berikut persentase laju pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021

Kabupaten Aceh Selatan :

No.	Tahun	Angka persentase
1.	2017	3,93%
2.	2018	4,53%
3.	2019	4,43%
4.	2020	0,05%
5.	2021	2,46%

Tabel 1

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan 2022

Selain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan turun drastis pada tahun 2020 penambahan masyarakat yang positif covid-19 sampai tahun 2021 juga semakin meningkat. Di Aceh, Satgas Penanganan Covid-19 telah memberikan data yang menyebutkan akan ada 100 lebih kasus positif virus Covid-19 pada tahun 2021. Sejak Maret 2020, total kasus Covid-19 terkumpul menjadi 10.313. Kota Banda Aceh menjadi zona merah dengan jumlah kasus terbanyak, disusul Kabupaten Aceh Besar.⁹

Saifullah Abdulgani selaku juru bicara penanganan covid-19 Pemerintah Aceh pada 1 September 2021 menyatakan beberapa Kabupaten/Kota yang sebelumnya zona merah berhasil keluar menjadi zona orange antara lain Banda Aceh dan Aceh Besar, sedangkan Kabupaten Aceh Selatan yang awalnya zona

⁹ Mikial, Bulkia. 2022. *Public Disobedience Dan Covid-19 (Studi Kasus: Aceh Besar)*. Banda Aceh : FISIP UIN AR-Raniry, Skripsi

orange justru berganti menjadi zona merah di Aceh.¹⁰

Dalam rangka menurunkan angka positif covid-19 yang terus meningkat menjadi zona merah, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membuat kebijakan yang dibantu oleh pemerintah Gampong dalam penanganan penyebaran positif covid-19 dengan membentuk relawan Gampong aman covid-19 yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang covid-19, mendata penduduk yang rentan sakit, melakukan penyemprotan disinfektan, Menyediakan peralatan medis, memberikan informasi terkait Covid-19, membuat posko, dan memastikan tidak ada pertemuan masyarakat seperti hajatan. Kedua, berkoordinasi erat dengan pemerintah Aceh Selatan dan instansi terkait.¹¹

Menanggapi hal diatas dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19 yang tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan melainkan juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, Pemerintah menjalankan Program PEN. Program PEN yang dituangkan dalam Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2020 merupakan rangkaian inisiatif yang ditujukan untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Ini merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal pemerintah dalam upaya percepatan penanganan wabah Covid-19. Menurut Pasal 2 PP No. 23 Tahun 2020, tujuan utama program PEN adalah untuk menjaga, menopang, dan meningkatkan ketahanan ekonomi badan usaha dalam menjalankan usahanya.¹²

¹⁰<https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/09/01/969/banda-aceh-dan-aceh-besar-kini-jadi-zona-orange-298-pasien-covid-19-semuh.html> (diakses 13 Februari 2023,19.49).

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/266704/Perbup%202021-12.pdf> (diakses pada 05 April 2023 11.53)

¹²https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/TH_Pemulihan-Ekonomi-Nasional_reviu.pdf (diakses 23 Februari 2023, 10.59)

Untuk mendukung kebijakan nasional dalam upaya penanganan covid-19 untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan maka pemerintah fokus mengarahkan penanganan pada bidang kesehatan, ekonomi sektor perikanan, UMKM dan bidang pariwisata.¹³ Pada bidang kesehatan di arahkan untuk pelaksanaan Vaksin Covid-19 diantaranya honorarium petugas vaksin yang diperkuat dengan peningkatan SDM tenaga kesehatan dalam penanganan dan pencegahan pandemi covid-19. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.310.619.969, untuk mendukung program penanggulangan kesehatan pandemi covid-19 tahun 2022.

Pemulihan ekonomi bidang perikanan tangkap dan budidaya diarahkan dengan pemberdayaan kelompok nelayan dan kelompok budidaya perikanan karena Kabupaten Aceh Selatan yang berada pada pesisir pantai dan mempunyai lahan usaha yang sangat produktif. Program bidang perikanan tangkap dan budidaya dengan pagu anggaran Rp. 6.401.460.000.

Selanjutnya bidang UMKM juga diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dengan memberikan dukungan dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, untuk berjalannya program tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyediakan dana sebesar Rp. 4.511.000.000.

¹³ Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Selatan 2022

Terakhir pada sektor pariwisata yang paling berdampak pada saat pandemi covid dimana menurunnya jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Aceh Selatan, untuk itu pada sektor pariwisata diarahkan agar dapat melakukan promosi wisata dan meningkatkan fasilitas pariwisata agar pengunjung dapat berwisata dengan senang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Menurut analisis M.Widyar Rahman sebagai peneliti, pandemi covid-19 tidak akan bertahan sampai bertahun-tahun. Karena dari waktu ke waktu jumlah kasus covid-19 terus mengalami penurunan.¹⁴ Hal ini tidak lepas dari kebijakan yang diambil pemerintah khususnya di Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah fokus pada pemulihan ekonomi meskipun memakan waktu yang panjang setidaknya sampai akhir 2022. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memerlukan strategi yang efektif untuk menstabilkan kembali angka pertumbuhan ekonomi dengan beberapa kebijakan untuk pemulihan ekonomi pasca covid-19.

Hipotesa sementara penulis dalam penelitian ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan yang tumbuh fluktuatif dalam artian tidak tetap atau berubah-ubah namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sangat turun drastis akibat dampak covid-19 dan Kabupaten Aceh Selatan tercatat pernah menjadi zona merah hal ini menunjukkan bahwa kasus covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan pernah terus meningkat.

¹⁴<https://m.bisnis.com/amp/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022> (diakses 14 Februari 2023, 21.13)

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas bahwa covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja akan tetapi sangat berdampak pada sektor ekonomi yang menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan sudah tergolong minus pada tahun 2020. menanggapi masalah tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengambil langkah kebijakan berupa strategi dalam upaya penanganan kasus covid dan pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan dengan harapan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan dapat diperbaiki dan mencapai target yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu, strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah fokus kepada sektor-sektor yang sangat terdampak covid-19 antara lain pada bidang kesehatan, ekonomi sektor perikanan, UMKM dan bidang pariwisata. Maka dari itu, penulis ingin meneliti tentang “Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang terdampak covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melihat Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang terdampak covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam konteks teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini ada tiga: ketidakpastian, inovasi, dan wawasan inovatif. Pertama, ketidakpastian dapat muncul dari penjelajahan jalan yang tidak konvensional, karena memungkinkan penemuan dan terobosan yang tidak terduga. Dengan menyimpang dari pendekatan tradisional dan merangkul metode yang tidak ortodoks, peneliti dapat menemukan pengetahuan dan wawasan yang berharga.

Kedua, inovasi dapat dipicu dengan mendorong batas-batas pengetahuan saat ini. Penelitian teoritis menawarkan kesempatan untuk berpikir di luar kotak, mempertanyakan keyakinan yang mapan dan menantang kebijaksanaan konvensional. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan ide, teori, dan solusi inovatif yang berpotensi merevolusi bidang studi.

Terakhir, mengejar penelitian teoritis dapat menghasilkan wawasan inovatif yang memperdalam pemahaman kita tentang fenomena kompleks. Dengan mempelajari seluk-beluk teori dan model, peneliti dapat mengungkap perspektif baru dan mengungkap hubungan yang tersembunyi. Penemuan ini tidak hanya mendorong kemajuan akademik tetapi juga memiliki implikasi praktis, memengaruhi berbagai sektor seperti teknologi, kedokteran, atau ilmu sosial.

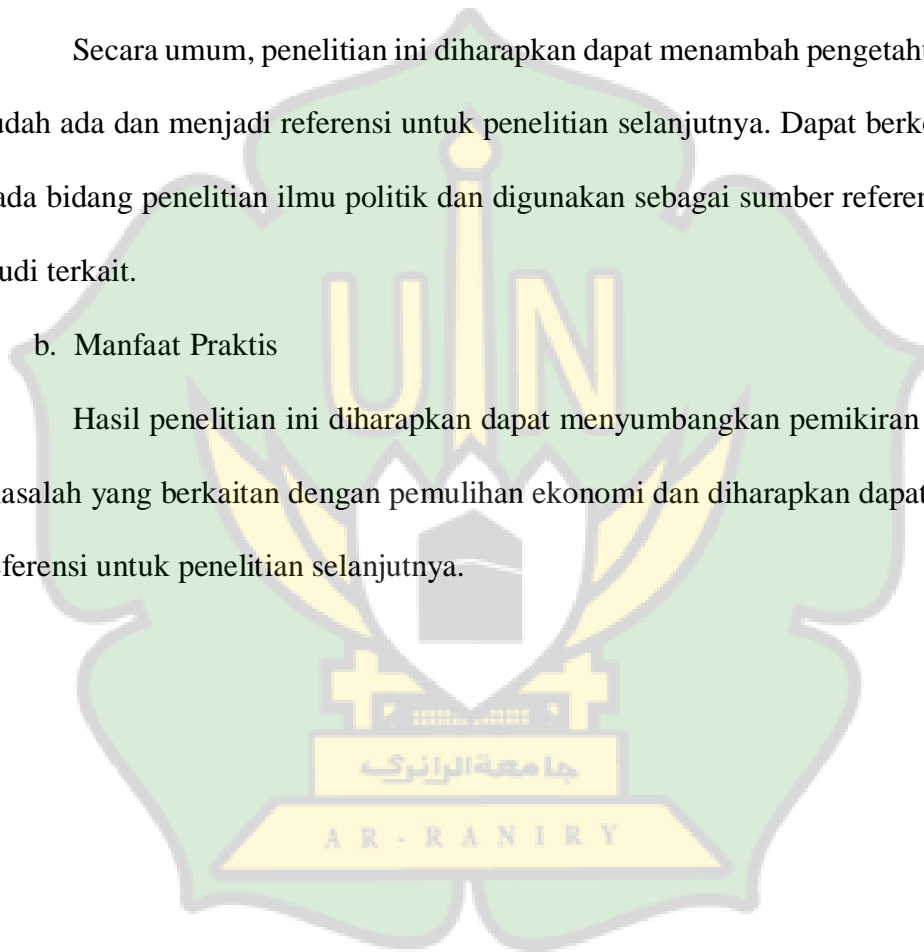
Secara keseluruhan, penelitian teoritis sangat menjanjikan dalam hal

ketidakpastian, inovasi, dan wawasan inovatif, menjadikannya komponen yang berharga dan tak terpisahkan dari upaya ilmiah. Dengan merangkul yang tidak diketahui, menantang pengetahuan yang ada, dan menggali perspektif baru, peneliti membuka jalan bagi kemungkinan dan kemajuan baru yang dapat membentuk masa depan.

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sudah ada dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat berkontribusi pada bidang penelitian ilmu politik dan digunakan sebagai sumber referensi untuk studi terkait.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang relevan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tulisan yang penulis jadikan sumber referensi guna memperkuat data dan informasi penulis, berikut ulasannya : Pertama, Toding, Apriana. dkk. “Strategi Dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19” hasil penelitian menunjukkan bahwa arah strategis dan kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Kota Makassar terkait dengan pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi di Makassar antara lain:

Pertama, bantuan sosial kepada pelaku usaha. Kedua, memperluas pembiayaan modal kerja, yaitu melalui sertifikasi dan pendampingan kualifikasi koperasi, mempermudah akses pinjaman lunak atau pinjaman dana bergulir untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari lembaga yang memberikan pinjaman seperti Kementerian Koperasi, yang disebut LPDB. Ketiga, dinas koperasi memberikan dukungan produk melalui pembinaan administrasi dan pembukuan, serta membantu dinas pariwisata dalam proses produksi dan pemasaran. Keempat, Strategi pengembangan destinasi wisata adalah menjadikan gang-gang sebagai destinasi wisata yang disebut wisata lorong.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca covid-

¹⁵ Toding, Apriana, Petrus Peleng Roreng, dan Ierthin Palullungan. (2021). "Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, 1(1), 46-60.

19 sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian, disini peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan mix metode antara kualitatif dan kuantitatif serta objek penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di Makassar dan penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

Kedua Edy Sutrisno, “Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang sangat dirasakan pada saat covid-19 adalah sektor UMKM dan Pariwisata, karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat strategi pemulihan ekonomi sektor UMKM di Indonesia adalah memberikan bantuan kepada badan usaha, memberikan insentif pajak, kemudahan dan restrukturisasi kredit, memperluas pembiayaan modal kerja, dukungan produk dan pelatihan e-learning. Kemudian strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengelolaan infrastruktur pariwisata.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang strategi pemulihan ekonomi pasca covid-19. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek

¹⁶ Sutrisno, Edy (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata. Jurnal Lemhannas RI, 9(1), 641-660.

penelitian dimana penelitian terdahulu fokus terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

Ketiga Armelia Maghvira dan Zaili Rusdi “Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Pekanbaru” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemulihan ekonomi sektor UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, sehingga strategi yang dihasilkan dapat meningkatkan pelatihan UMKM dalam pemasaran bisnis digital dan memperkuat dukungan terhadap keterlibatan UMKM. memulai bisnis, izin ekspor/impor dan pemasaran lokasi.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu fokus terhadap pemulihan ekonomi daerah di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

Keempat Sri Ayu Lestari “Strategi Pemulihan Ekonomi Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Dinas Pariwisata Kota Mataram” Hasil penelitian Menjelaskan bahwa covid-19 berdampak pada menurunnya kestabilan ekonomi pariwisata di Kota Mataram, kunjungan wisatawan asing berkurang, industri pariwisata ditutup, dan sumber daya manusia pariwisata di-PHK. Pariwisata Kota

¹⁷ Armelia, Maghvira dan Zaili, Rusdi. (2021). Strategi Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Daerah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Pekanbaru. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3),487-501

Mataram berupaya keras untuk meminimalisir dampak COVID-19 melalui berbagai program yang melibatkan dinas pariwisata. Program ini dikembangkan selama dan setelah Covid-19.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pemulihan ekonomi terdampak covid-19. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya penelitian terdahulu hanya fokus kepada 1 sektor yaitu pariwisata sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap semua sektor yang terdampak covid-19. selanjutnya pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kota Mataram sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

Kelima Nirmalasari, B “Strategi Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdampak Covid-19 di Kota Palopo” berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan adanya kebijakan pemerintah atas pemulihan ekonomi nasional maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang positif, di kota Palopo sendiri pertumbuhan ekonomi masih tidak stabil akibat pandemi covid-19.

Dengan adanya strategi dari pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi maka berdasarkan data keragaan UMKM kota Palopo per Desember jumlah UMKM semakin meningkat yang mana pada tahun 2019 total UMKM sebanyak 6.853, di tahun 2020 sebanyak 11.022 dan di tahun 2021 sebanyak 12.504. dapat dikatakan jumlah UMKM yang meningkat tersebut adalah hasil dari peran

¹⁸ Sri Ayu Lestari. (2021) “Strategi Pemulihan Ekonomi Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Dinas Pariwisata Kota Mataram”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram.

pemerintah dalam memulihkan perekonomian di Kota Palopo.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pemulihan ekonomi terdampak covid-19. Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi terdampak covid-19. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kota Palopo sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

2.2 Definisi Operasional

2.2.1 Pengertian Covid-19

Kata corona berasal dari bahasa Latin dan berarti mahkota. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 disebut Covid-19, singkatan dari penyakit coronavirus 19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia sering menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).²⁰

Sejarah Corona virus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Kota Wuhan, China, sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Gejala

¹⁹ Nirmalasari, B. (2022). "Strategi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdampak Covid-19 di Kota Palopo". Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

²⁰ <http://digilib.iainkendari.ac.id/3392/2/3%20BAB%20II.pdf> (diakses pada 05 April 2023-21.40)

dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, dan dispnea yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia.²¹

Penyebaran virus ini begitu cepat bahkan hampir seluruh dunia, tak heran hingga Indonesia pun merasakan dampaknya. Pemerintah Negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan *lockdown* dan *social distancing* untuk mempercepat upaya menghentikan penyebaran Covid-19. Indonesia, negara terpadat kelima di dunia, tidak ketinggalan dalam mengambil langkah untuk memerangi Covid-19 dengan negara-negara lain di dunia, tetapi jenis tindakan di Indonesia disebut PSBB (pembatasan sosial berskala besar). PSBB sendiri bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, seperti *lockdown* dan *social distancing*.²²

Dampak Covid-19 bukan hanya pada aspek kesehatan saja, tetapi juga pada aspek ekonomi yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.²³ Kondisi pandemi Covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi di Indonesia sejak diberlakukannya PSBB .

Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom., MM anggota DPRD DIY yang juga menjadi pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, menyampaikan minimal ada 5 dampak besar pandemi Covid-19 bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi

²¹ <https://genecraftlabs.com/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>(diakses pada 5 April 2023 21.07)

²² Sutrisno, Edy. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 641-660.

²³ Dani, Rahmaddian. (2021). Aktivitas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inhu.(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Dampak kedua yang sangat terlihat dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka Investasi diberbagai sektor usaha. Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional seperti Penurunan penerimaan pajak. Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴

Pandemi covid-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Namun demikian, menjadi hambatan bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnisnya.

Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat perlu menyadari kondisi real yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu hadir dan memberikan terobosan dan bantuan agar dampak pandemi covid-19 di sektor ekonomi tidak terus berlanjut dan semakin mempengaruhi secara negatif kehidupan masyarakat secara luas.

Maka dari itu Pemerintah menjalankan Program PEN. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi covid-19. Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program

²⁴ <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/> (diakses pada 6 April 2023 11.03)

PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.²⁵

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Strategi Pemerintah

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata Stratos artinya tentara dan ego artinya pemimpin.²⁶ Pada dasarnya, konsep strategi sudah berusia berabad-abad dan secara historis diartikan ke konteks militer.²⁷ Menurut ahli strategi dan perang Carl Von Clausewitz, konsep strategi adalah menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang.²⁸ Menurut Marrus (2002:31), strategi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan rencana para pemimpin yang fokus pada tujuan kepemimpinan organisasi, disertai dengan penyusunan metode serta upaya untuk mencapai tujuan tersebut.²⁹ Quinn (1999:10) mendefinisikan strategi sebagai bentuk atau rencana yang fokus terhadap tujuan utama, kebijakan dan urutan tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh.³⁰

²⁵https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/TH_Pemulihan-Ekonomi-Nasional_reviu.pdf (diakses 23 Februari 2023, 10.59)

²⁶ Juliyanto, I. T. (2015). *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

²⁷ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran: Prinsip dan Penerapan*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019). Hlm. 4

²⁸ Veithzal Rivai Zainal, dkk. *Manajemen Strategis: Strategi Bersaing Islami*. (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020). Hlm. 23

²⁹http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/Jurnal-Enda-Khairunnisa-FISIP.pdf (diakses pada 12 April 2023 01.54)

³⁰ Aldyanata, Muhammad Rizqon. (2021). *Strategi yayasan Wafizs Al Amin Center dalam meningkatkan kuantitas jama'ah: Studi kasus pada yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Dari ketiga pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh para pemimpin dalam berperang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari kegiatan penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.³¹ dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan dan memenangkan peperangan.³²

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa strategi pemerintah daerah termanifestasi dalam wujud rencana pembangunan berjangka yang mengacu pada rencana pembangunan nasional. Rencana pembangunan tersebut adalah;

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan

³¹ Rachmat, Manajemen Strategik, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 2.

³² Juliyanto, I. T. (2015). *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dearah Operasi VII Madiun)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yaitu rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Menurut Craig & Grant pengertian strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and longterm goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (*achieve the goals and objectives*).³³ Dalam hal penetapan rancangan pembangunan daerah sebagaimana yang penulis sampaikan sebelumnya, pemerintah daerah telah menetapkan sasaran, tujuan jangka panjang, arah tindakan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Diantara fokus tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan dapat diperbaiki dan mencapai target yang sudah ditetapkan.

Sedangkan definisi dari strategi publik, menurut Mulgan strategi publik adalah "*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies to achieve public goods* (strategi publik adalah penggunaan sumberdaya dan kekuatan publik secara sistematis oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang publik)".³⁴ Atas dasar pengertian

³³Rafika Ismawati, E-Jurnal: *Strategi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Kesehatan Lingkungan di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang)*. (Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017).

³⁴Suwarsono Muhammad. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012). Hlm. 70

tersebut Mulgan juga menguraikan bahwa, untuk maksimalisasi strategi publik, pemerintah harus memberikan perhatian sistematis pada lima komponen³⁵ berikut, yakni;

1. Tujuan (*purposes*)

Dalam merancang strategi, hal utama yang harus diperhatikan adalah tujuan. Tujuan dapat dirumuskan dengan berangkat dari pertanyaan mengapa ini harus dilakukan, lalu melakukan perumusan tujuan dengan menganalisis kebutuhan publik, melalui aspirasi dan ketakutan publik.

2. Lingkungan (*environments*)

Lingkungan adalah tempat untuk mencapai tujuan dari strategi yang akan dirumuskan. Lingkungan juga berarti kondisi, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal pemerintahan. Kondisi internal seperti amunisi dan kapasitas pemerintah, sedangkan kondisi eksternal dapat berupa kondisi sosial masyarakat, politik, ekonomi dll.

Lingkungan yang harus diperhatikan tidak hanya lingkungan saat ini, tapi juga lingkungan di masa depan. Oleh sebab itu, dalam menentukan strategi, alangkah baiknya melakukan Analisa terhadap kemungkinan lingkungan di masa depan, dan juga merumuskan kebijakan berkelanjutan. Lingkungan adalah komponen yang harus sangat diperhatikan.

3. Pengarahan (*directions*)

³⁵Geoff Mulgan. *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. (New York: OUP Oxford, 2009), Hlm. 4. (Diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GZh2z6wZasC&oi=fnd&pg=PR7&ots=4JjQhC1HVv&sig=pu_70tWewITL_pSD9tvF-EsjOWY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false pada 4 Juni 2022)

Pengarahan adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan untuk memobilisasi sumberdaya manusia dibawahnya dengan memahami tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Arahan dari pimpinan selalu menjadi hal yang paling penting, karena pimpinan adalah sosok pemersatu dan koordinator dalam pelaksanaan strategi.

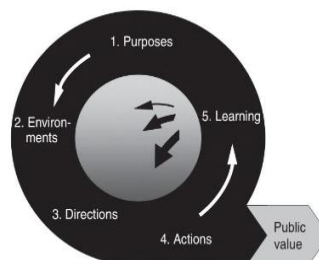
4. Aksi (*action*)

Sehebat apapun strategi tidak akan pernah terealisasi tanpa tindakan. Aksi adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, aksi dapat berupa pembuatan undang-undang, kebijakan dan program-program kerja dan mengimplementasikannya. Aksi adalah wujud nyata dari pelaksanaan strategi. Aksi tidak hanya tindakan keluar, tapi juga tindakan kedalam, seperti sosok pemimpin yang menginspirasi dan mampu meyakinkan anggota organisasi untuk terus berkomitmen pada tujuan yang ingin dicapai.

5. Belajar (*learning*)

Belajar adalah sebuah sistem untuk memahami, dan mengamati dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Mencakup berhasil tidaknya suatu aksi, serta apakah harus bertahan pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

Untuk lebih mudah memahami lima komponen tersebut, perhatikan gambar ilustrasi dibawah ini:



Gambar 1.1
Sumber: Geoff Mulgan (2009, hlm. 5)

2.3.2 Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi adalah upaya untuk melakukan pengaturan baik di pedesaan maupun perkotaan untuk mencapai pendekatan berbasis wilayah untuk meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang terkena dampak. Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi ditujukan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri melalui pekerjaan sementara dan peningkatan pendapatan. Dalam jangka panjang, pemulihan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kondisi endogen bagi pengaktifan kembali ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.³⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Bahkan dalam jangka pendek atau panjang. Dalam situasi buruk, bencana atau konflik, salah satu tantangan penting pemulihan ekonomi adalah rendahnya daya beli masyarakat lokal untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tantangan lain adalah sulitnya akses ke pasar eksternal dan lebih menguntungkan karena kemiskinan.

Dari teori di atas menunjukkan jika situasi yang di sebabkan dari sebuah insiden atau peristiwa akan menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan transaksi jual beli dengan semestinya. hal ini dibuktikan dengan rendahnya daya beli lokal baik itu dalam membeli barang ataupun jasa. Maka dari itu pangsa pasar dalam berbagai sektor akan saling berdampak. Ketika salah satu sektor mengalami

³⁶ <http://repo.uinsatu.ac.id/23265/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada 12 April 2023 00.25)

masalah tentu akan berdampak ke sektor sektor sekitarnya.

Pemulihan merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan guna memulihkan keadaan warga serta lingkungan yang terkena bencana alam/non alam dengan mengembalikan fungsi lembaga, prasarana serta sarana melalui pelaksanaan aktivitas rehabilitasi (UU No 24 Th. 2007).

Proses mengembalikan kondisi ekonomi warga ataupun negara yang terkena akibat dari bencana pandemi Covid-19 di Indonesia, melalui program ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun program itu seperti Program Ekonomi Nasional (PEN) yang dimana aktivitas pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan guna memulihkan kondisi ekonomi dan merupakan dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dan guna menghadapi ancaman perekonomian (PP No.23 Th. 2020).

Menurut menko perekonomian ada tiga hal yang perlu diperhatikan guna dapat *exit strategy*. Yaitu diperlukan *timeboxing* supaya berhasil di dua aspek, hingga perekonomian pulih dan aman dari virus. Yang pertama pencegahan penyebaran virus dengan melalui perluasan kapasitas *treatment* serta *testing*, vaksin, serta menemukan obat. lalu yang kedua penyelamatan perekonomian global, dengan dukungan bagi warga dan dunia usaha yang terdampak, percepatan pemulihan ekonomi, serta pembukaan ekonomi terhadap saat virus sudah mereda (Dr. Airlangga).³⁷

³⁷ Rizki, Zahrul. (2022). *Evaluasi Upaya Pemerintah Terhadap Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh* (doctoral dissertation, institut pemerintahan dalam negeri).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah tradisi khusus dari ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan manusia baik dalam bidang maupun aplikasinya. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses untuk memperoleh data atau informasi yang masuk akal tentang suatu masalah dari aspek atau bidang suatu objek. Penelitian kualitatif menceritakan tentang fenomena yang mengutamakan penghayatan terhadap penelitian itu sendiri.³⁸

John Creswell (2008) memperkenalkan tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut: Pertama, mengidentifikasi isu atau masalah yang menjadi tujuan penelitian bahwa isu tersebut layak diteliti. Kedua adalah diskusi atau studi kepustakaan (literatur) peneliti mencari bahan bacaan berupa jurnal atau buku-buku yang memuat bahasan dan teori tentang topik yang akan diteliti. Ketiga, menentukan tujuan penelitian pada bagian ini peneliti mengidentifikasi maksud utama dari penelitian. Keempat pengumpulan data dimana peneliti menentukan calon partisipan termasuk jumlah partisipan yang akan terlibat. Kelima adalah analisis data. Yang Keenam adalah laporan, laporan penelitian mengarahkan pembaca sebagai orang yang terlibat dalam situasi tersebut.³⁹

³⁸ Cut Medika, Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu komunikasi." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 1.2 (2018):83-90

³⁹ Semiawan, Conny R.(2010). *Metode penelitian kualitatif* . Grasindo.

3.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena fokus merupakan pusat dari objek penelitian, dan tidak ada peneliti yang dapat melakukannya tanpa adanya fokus tersebut. Mengidentifikasi prioritas penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, membangun fokus penelitian berarti dengan memiliki fokus maka peneliti dapat menetapkan lokasi penelitian. Kedua, fokusnya adalah pada pengaturan kriteria penahanan-penahanan secara efektif untuk menangkap informasi yang masuk.

Menetapkan fokus penelitian yang tepat mencegah pengumpulan data yang tidak relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, fokus penelitian akan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan sifatnya yang masih bersifat sementara, sejalan dengan perkembangan masalah yang diidentifikasi oleh penulis pada lokasi penelitian.

Menentukan fokus penelitian untuk membatasi peneliti agar tidak terjebak pada hal-hal yang sangat umum dan tidak terlalu relevan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan elemen- elemen penting dalam penelitian, karena dengan adanya lokasi penelitian maka tujuan dan objek mudah diterapkan sehingga dapat mempermudah berjalannya penelitian. Mengingat judul penulis dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten

Aceh Selatan maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan penulis gunakan adalah data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder dari jurnal dan media. Data primer adalah data langsung dari tangan pertama, untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dengan informan penelitian.

Wawancara terstruktur adalah wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang mirip dengan percakapan informal, metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.⁴⁰

Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dari tangan kedua yang berbentuk laporan, seperti data dari media publikasi atau lembaga publikasi data. Penulis mendapatkan data sekunder melalui fitur jelajah internet dan mengutip data dari media dan lembaga publikasi data yang terpercaya.

3.5 Informan penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek penelitian. Informan penelitian dipilih dengan cermat untuk menjadi pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan, informan adalah tempat dari mana

⁴⁰Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008). Hlm.180-181

informasi dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini sebanyak (4) orang sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

No.	Informan	Nama	Jabatan	jumlah
1.	Dinas Kesehatan	Faizah Abbas S.Tr.Keb	Sekretaris	1
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Hadi Suhaima S.Pi., M.Si	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1
3.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Yusra, S.T	Kepala Dinas Bidang UKM	1
4.	Dinas Pariwisata	Muchsin, S.T	Kepala Dinas Pariwisata	1
5.	Masyarakat	Abd majid	Nelayan	1

Tabel 1.2

Sumber : Hasil wawancara penulis dengan informan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data seperti yang telah ditetapkan. Berikut teknik peneliti mengumpulkan data :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Menurut, Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴¹

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada informan yang dijawab secara lisan atau tertulis oleh informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang sikap, pengetahuan, dan perilaku informan terhadap sasaran penelitian. Informan atau narasumber adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi terkait data yang diperlukan untuk penelitian ini

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah dini dalam tata cara pengumpulan informasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi literatur dari buku-buku tentang berbagai teori dan perspektif, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi

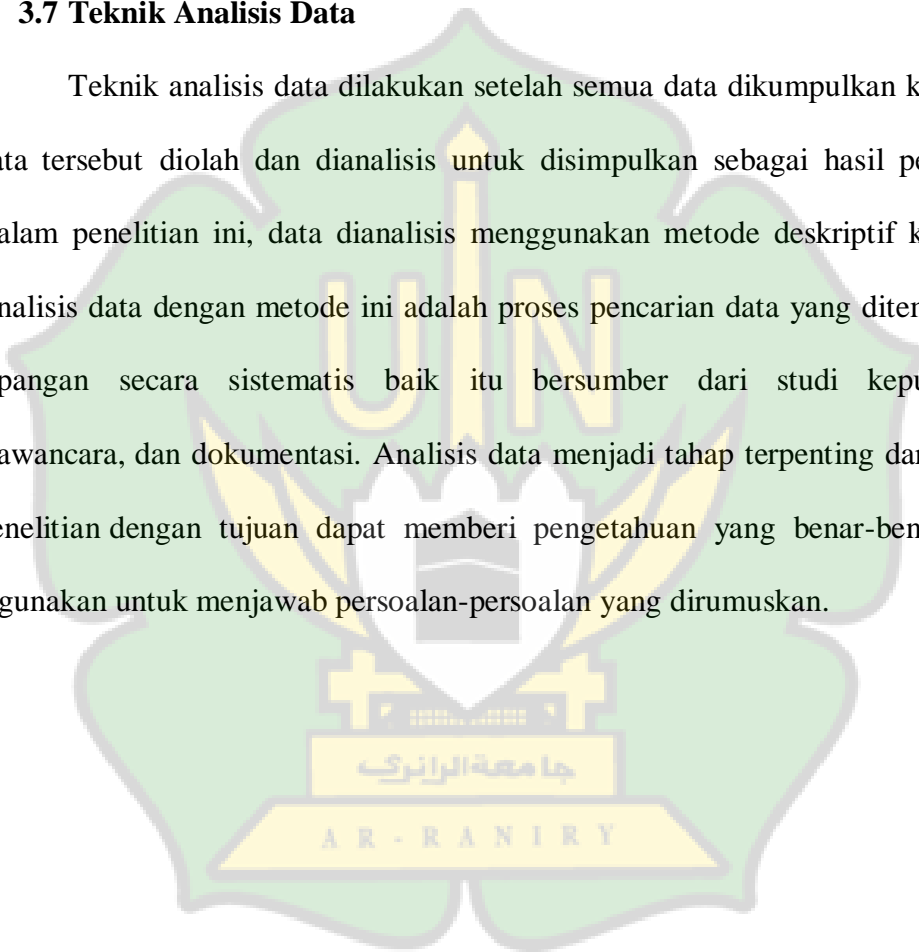
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. pengumpulan informasi yang ditujukan kepada pencarian informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis

⁴¹ Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. (2019) "Metode penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan." *Jurnal Informasi Kimia dan Pemodelan* 53.9 : 1-228.

ataupun dokumen-dokumen elektronik, foto-foto, serta gambar yang berkaitan dengan penelitian. Dimana hasil riset akan terpercaya apabila didukung foto-foto ataupun karya tulis akademik yang sudah ada sebelumnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dengan metode ini adalah proses pencarian data yang ditemukan di lapangan secara sistematis baik itu bersumber dari studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menjadi tahap terpenting dari sebuah penelitian dengan tujuan dapat memberi pengetahuan yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dirumuskan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan

4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Kabupaten yang tergolong tertua di Provinsi Aceh. Perjuangan untuk meningkatkan status Aceh Selatan menjadi sebuah Kabupaten di mulai sejak tanggal 10 Oktober 1945 dengan Pembentukan Komite Nasional Kewedanaan Tapaktuan yang dikenal dengan KNID. Usaha membentuk sebuah Kabupaten terus dilakukan dengan mencari dukungan dari Komite Nasional Daerah Aceh dan Komite Nasional Daerah Bakongan serta Singkil.

Terpilih Ahmad Banuali sebagai ketua KNID Tapaktuan atas persetujuan dari residen Aceh T.Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah Aceh Tuanku Mahmud sehingga adanya pemekaran hanya untuk tiga kewedanaan yaitu Tapaktuan, Bakongan dan Singkil. Kepemimpinan T.Nyak Arief dilanjutkan oleh T.Chik M Daud Syeh dan berlanjut juga pembicaraan untuk membentuk sebuah Kabupaten.

Komite Nasional Daerah Tapaktuan berhasil memilih Bupati Aceh Selatan atas perizinan T.Chik M Daud Syeh sehingga Kabupaten Aceh Selatan resmi dibentuk. Pada tanggal 18 Mei 1946 diadakan pemilihan Bupati Aceh Selatan yang pertama dan pemilihan tersebut dimenangkan oleh M. Salim Hasyimi dengan perolehan suara terbanyak, dengan demikian resmilah lahirnya Kabupaten Aceh

Selatan menjadi Kabupaten otonom.⁴²

Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, wilayah Kabupaten Aceh Selatan merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.⁴³ Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 Tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, antara lain : Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 02^o 23' 24" - 03^o 44' 24" LU dan 96^o 57' 36" – 97^o 56' 24" BT dengan batas wilayah disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo lues, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.⁴⁴

Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas wilayah mencapai 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Berdasarkan penetapan dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pembagian administrasi pemerintah Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas : Kecamatan, mukim dan gampong.⁴⁵ Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 Kecamatan, 44 Mukim dan

⁴² Aceh Selatan Dalam Rangka 2015

⁴³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan (diakses pada 5 April 2023, 15.12)

⁴⁴ Aceh Selatan Dalam Angka 2022

⁴⁵ Bappeda Kabupaten Aceh Selatan 2015

260 Gampong.⁴⁶ Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Sawang.

Secara umum, wilayah Kabupaten Aceh Selatan merupakan kombinasi antara daerah pedalaman, terpencil, pesisir dan pegunungan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. sebelah barat wilayah pesisir sangat potensial untuk dikembangkan wilayah perikanan dan agrowisata, sedangkan wilayah sebelah utara, selatan dan timur wilayah pegunungan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agriindustri dan pertanian/perkebunan seperti tanaman pala, kelapa sawit, nilam, kopi, kakao dan cengkeh serta karet.⁴⁷

Wilayah Aceh Selatan kaya akan mineral logam, mineral non logam dan sumber daya batuan. Namun di sisi lain, Aceh Selatan lebih rentan terkena bencana geologis dan alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa tektonik.. Namun potensi pertambangan ini belum dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Pasalnya, hingga saat ini hasil tambang utama di Aceh Selatan adalah bijih besi dan turunannya yang dijual atau diekspor dalam bentuk bahan baku, sehingga masyarakat Aceh Selatan belum bisa menikmati hasil produksi tersebut.⁴⁸

Disamping itu eksploitasi alam untuk usaha pertambangan sarat dengan kerusakan lingkungan bila tidak dikelola dengan cara praktek pertambangan yang baik (*good minning practice*), dimana sektor pertambangan ini satu sisi memberi

⁴⁶ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸<https://inspektorat.acehselatankab.go.id/dokumen/8ca508ab-c283-43b4-9106-4d95902ef56b> (diakses pada 08 mei 2023 09.07 wib)

kontribusi nyata berupa peningkatan PAD Kabupaten Aceh Selatan, di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama penambangan yang dilakukan tanpa izin (PETI).

4.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Covid-19

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi.⁴⁹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan suatu wilayah yang akan datang. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB setiap tahunnya.

Sebagaimana data penulis terhitung dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling menonjol kontribusinya terhadap PDRB yang menjadi keunggulan daerah. selanjutnya diikuti oleh sektor kontruksi, perdagangan serta sektor administrasi

⁴⁹ Nirmalasari, B. (2022). "Strategi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdampak Covid-19 di Kota Palopo". Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial.⁵⁰

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling menonjol kontribusinya terhadap PDRB yang berjumlah 1.236.510,5 (25,47%) selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dimana masing-masing memberikan kontribusi 16,61%, 15,29% dan 13,06%.

Kesejahteraan hidup penduduk dibangun dari pertumbuhan ekonomi daerah, namun pertumbuhan ekonomi Aceh selatan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan masih lebih baik. Hal ini menandakan bahwa potensi ekonomi daerah sebenarnya cukup besar untuk tumbuh. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Selatan fokus pada sektor-sektor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga menjadikan sektor tersebut sebagai sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus lebih baik dari tahun sebelumnya, Kabupaten Aceh Selatan sangat kaya dengan hasil alamnya baik dari laut maupun didarat sehingga Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi besar untuk terus berkembang untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. maka hal yang paling utama adalah pemerintah fokus pada sektor-sektor yang memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Aceh Selatan dan menjadikan sektor tersebut sebagai sektor unggulan daerah.

⁵⁰ Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019.

4.1.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Pada Masa Covid-19

Selama periode 2019-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,43% menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,53%. Sedangkan pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Aceh Selatan tidak menunjukkan peningkatan melainkan semakin menurun sangat drastis yaitu -0,05%.

Masrizal S.E.,M.Si selaku kepala Bappeda Aceh Selatan menegaskan bahwa pada tahun 2020 hampir semua sektor terdampak covid-19. Sektor yang terdampak paling besar adalah sektor kesehatan, ekonomi bidang perikanan, UMKM dan Pariwisata. Akibat dari berlakunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) secara langsung sehingga menghentikan aktivitas masyarakat secara tiba-tiba dan berdampak pada ekonomi masyarakat.⁵¹

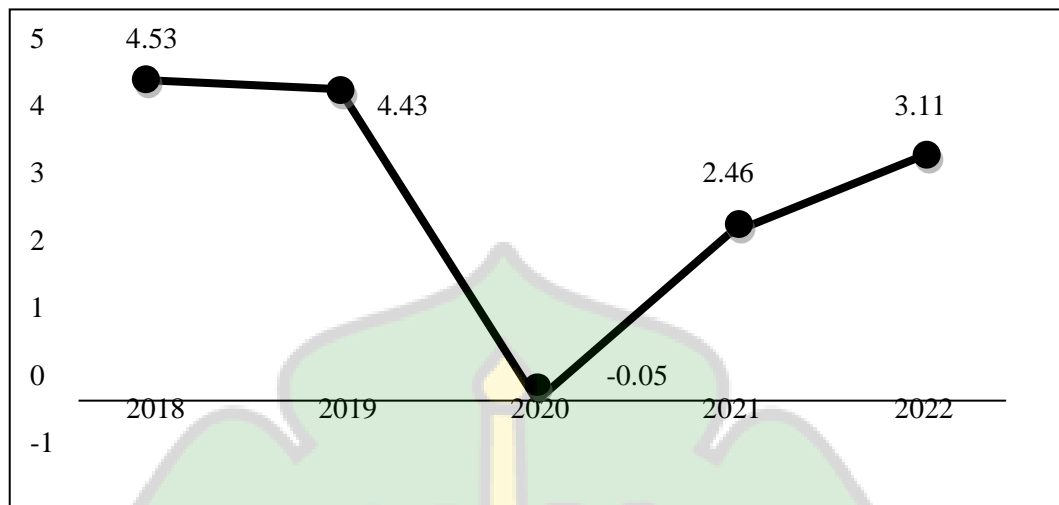
Meskipun demikian dimasa pandemi covid-19 sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan di Kabupaten Aceh Selatan karena wilayah Aceh Selatan sangat kaya dengan hasil alamnya dan sangat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan nilai PDRB Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 2,46% naik sebesar 2,96% dibanding dengan tahun 2020, dan pada tahun 2022 terus naik menjadi 3,11%.⁵² Berikut grafik

⁵¹<https://sangajudan.acehselatankab.go.id/berita/pemkab-gelr-musrenbang-rkpd-2023-kabupaten-aceh-selatan/> diakses pada 20april2023 00.05.

⁵² Aceh Selatan Dalam Rangka Tahun 2023 Hal 399

persentase laju pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 Kabupaten Aceh Selatan :



Gambar 1.2

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan 2023

Berdasarkan gambar grafik diatas bahwa, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengambil langkah kebijakan berupa strategi dalam upaya penanganan kasus covid dan pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan dengan harapan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan dapat diperbaiki dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Pemerintah harus benar-benar fokus dalam membuat kebijakan dan mengarah kepada sektor yang terdampak agar mampu mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan.

4.2 Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Yang Terdampak Covid-19

Menurut Craig & Grant pengertian strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and longterm goals*) sebuah perusahaan dan arah

tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (*achieve the goals and objectives*). Berangkat dari pengertian strategi Craig & Grant, penulis mencoba memahami dan mengevaluasi teori tersebut dengan menghubungkan hasil penelitian penulis tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pemulihan ekonomi pasca covid-19.

Dalam hal penetapan rancangan pembangunan daerah sebagaimana yang penulis sampaikan sebelumnya, pemerintah daerah telah menetapkan sasaran, tujuan jangka panjang, arah tindakan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Diantara fokus tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan dapat diperbaiki dan mencapai target yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, terus melakukan upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi selama pandemi covid-19 dengan berbagai solusi yang ditawarkan untuk dapat meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat. Dalam masa pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan pemerintah menggalakkan banyak program dan juga mengalokasi sumber daya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah fokus kepada sektor-sektor yang sangat terdampak covid-19 antara lain pada bidang kesehatan, ekonomi sektor perikanan, UMKM dan bidang pariwisata.

4.2.1 Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Kesehatan

Peristiwa covid-19 memberikan dampak yang besar bagi kehidupan

masyarakat pada berbagai sektor salah satunya sektor kesehatan. Pengaruh pandemi covid-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena semakin hari yang positif covid-19 semakin meningkat. Banyak masyarakat yang takut dan trauma dengan virus corona yang berakibat sistem imun masyarakat menurun.⁵³

Selain kasus masyarakat yang terkena covid-19 semakin meningkat banyak tenaga kesehatan yang berguguran karena tertular dari pasien yang positif covid-19 juga kelelahan dalam menangani jumlah pasien yang semakin meningkat. Banyak upaya pencegahan yang sudah dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat diantaranya karantina bagi masyarakat yang pulang bepergian dari luar kota, adanya pembatasan jarak, mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya.⁵⁴

Saifullah Abdulgani selaku juru bicara penanganan covid-19 Pemerintah Aceh pada 1 September 2021 menyatakan bahwa Kabupaten Aceh selatan yang awalnya zona orange justru berganti menjadi zona merah di Aceh hal ini menjadi tantangan yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk terus menangani masalah covid-19.⁵⁵

Indikator derajat kesehatan masyarakat dilihat dari menurunnya angka kematian bayi. Di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 986/1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 982/1000 kelahiran hidup

⁵³ <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1181-dampak-covid-19-dalam-bidang-kesehatan>

⁵⁴ https://www.kominfo.go.id/content/detail/32437/masyarakat-dan-pemerintah-bersama-tekan-penularan-covid-19-lewat-protokol-kesehatan/0/virus_corona. diakses pada 20 April 2023 20.13 wib

⁵⁵ <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/09/01/969/banda-aceh-dan-aceh-besar-kini-jadi-zona-orange-298-pasien-covid-19-semuh.html> (diakses 13 Februari 2023, 19.49).

pada tahun 2021. Menurunnya angka kelangsungan hidup bayi tersebut juga meningkatnya angka kematian bayi yaitu dari 3.951 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 4.084 kelahiran hidup atau sebanyak 48 bayi pada tahun 2021.⁵⁶

Fenomena ini harus disikapi lebih serius untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kematian bayi dan kelahiran bayi yang bergizi buruk pada masa pandemi covid-19. Dengan itu Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu meningkatkan sosialisasi akan pentingnya merencanakan kelahiran baik dari segi jumlah maupun jarak kelahiran anak.

Selain meningkatkan sosialisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan akses layanan yang berkualitas. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan sehingga perlunya perhatian pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa selama adanya pandemi covid-19 derajat kesehatan masyarakat terus menurun, semenjak diberlakukannya PSBB aktivitas masyarakat sangat berubah harus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan upaya agar masyarakat dapat pulih dari trauma pandemi ini dan masyarakat dapat beraktivitas kembali pasca pemulihan covid-19. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Faizah Abbas, S.Tr.Keb selaku Sekretaris Dinas

⁵⁶ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023

Kesehatan, ia mengatakan bahwa :

“Selama dilanda pandemi, pemerintah telah mengambil kebijakan berupa program penyuluhan kesehatan dengan memberi bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat guna dapat memulihkan trauma masyarakat terhadap virus covid-19 ketika trauma tersebut sudah pulih maka masyarakat dapat beraktivitas kembali. Karena kita ketahui bersama pada saat covid-19 interaksi antar masyarakat susah apalagi masyarakat yang pernah terkena covid-19 diasingkan dan diisolasi dari itu banyak masyarakat yang trauma”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah kita ketahui bahwa, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serius dalam menangani penyebaran covid-19 dengan menjalankan berbagai program seperti adanya penyuluhan kesehatan. Tidak sedikit bahkan hampir semua masyarakat mengalami trauma karena belum pernah terjadi penyebaran covid-19 sebelumnya sehingga masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Tidak adanya interaksi antar sesama masyarakat juga berdampak pada perekonomian masyarakat yang semakin hari semakin menurun. Hal senada juga disampaikan oleh ibu Faizah Abbas, S.Tr.Keb :

“Kita tahu bahwa selama pandemi masyarakat susah bekerja bahkan ada yang diberhentikan bahkan di PHK akibat aktivitas yang dibatasi sehingga ekonomi masyarakat semakin menurun karena tidak ada mata pencaharian. selain itu juga pada masa covid-19 angka kematian bayi semakin meningkat Menanggapi hal tersebut pemerintah memberikan anggaran bagi masyarakat yang terdampak covid-19 juga anggaran gizi buruk untuk bayi, ibu hamil dan lansia berupa pemberian makanan tambahan. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa selain fokus terhadap penyebaran kasus covid-19 pemerintah juga fokus terhadap masyarakat yang perekonomiannya terdampak akibat covid-19 sehingga

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Faizah Abbas (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 17 April 2023 bertempat dirumah kediaman.

⁵⁸ Loc.cit

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan anggaran khusus kepada masyarakat dengan harapan dapat memulihkan kembali ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Faizah Abbas, S.Tr.Keb :

“Menurut saya menurunnya pertumbuhan ekonomi ini adalah masalah dunia berarti masalah bersama, jika ingin membangkitkan kembali harus bergerak bersama. jika yang bergerak itu satu bidang saja tidak bisa harus bergerak semua bidang khususnya bidang ekonomi yang sangat terdampak covid-19. Jadi, semuanya harus bersatu. Menurut saya, upaya pemerintah dibidang kesehatan sudah sangat maksimal seperti adanya pelatihan, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, lansia dan balita dan kita lihat belum hitungan tahun keadaan masyarakat sudah kembali normal karena trauma masyarakat sudah pulih dan masyarakat dapat kembali bekerja sehingga tidak terus-terusan mengharapkan bantuan dari pemerintah.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan menjalankan program-program yang berdampak positif pada masyarakat, ketika masyarakat merasa takut dan trauma maka masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan itu pemerintah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar kembali pulih dari trauma covid-19. Ketika trauma sudah pulih maka masyarakat kembali melakukan aktivitas seperti biasa dengan kembali bekerja dan memperbaiki perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data dan juga hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dalam proses penelitian ini, penulis ketahui bahwa adanya perubahan RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 karena adanya perubahan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan akibat covid-19. Pada sektor kesehatan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan program sebagaimana

⁵⁹Ibid

hasil wawancara penulis dengan informan diatas. Dengan mengalokasikan sumber daya sebesar Rp.5.923.888.162 pada tahun 2021 dalam masa covid-19.

4.2.2 Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Perikanan

Pandemi covid-19 telah mengganggu kehidupan dan mata pencaharian semua individu diseluruh dunia. Virus yang menyebar dengan cepat sudah mengakibatkan perubahan ekonomi masyarakat karena potensi ekspor industri menurun drastis termasuk sektor perikanan sehingga mengubah kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang tak terhitung jumlahnya apalagi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang berada diwilayah pesisir dan banyak mengandalkan sektor perikanan untuk bertahan hidup.

Gampong pesisir di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 92 Gampong atau sebesar 35,38%.⁶⁰ Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi yang cukup besar dengan sumber daya ikan yang beragam seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, udang dan ikan karang. Namun dampak pandemi covid-19 setelah berlakunya PSBB masyarakat pesisir yang biasanya melakukan produksi dan distribusi produk perikanan terganggu karena menurunnya permintaan konsumen termasuk dari restoran, rumah makan dan hotel sehingga banyak usaha yang tutup dan berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat.⁶¹

Pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun

⁶⁰ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Selatan Bab II-7

⁶¹ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Selatan Bab II-192

2020 dalam rangka penanganan covid-19 di Indonesia. Akibat dari adanya pembatasan gerak antar masyarakat menyebabkan sektor perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sebelum terjadinya covid-19 termasuk kegiatan budidaya, penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan.⁶²

Sebagaimana tabel perkembangan perikanan yang penulis sajikan berikut :

No.	Data	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Perkembangan Perikanan laut	29.901,85	32.712,70	30.856,00
2.	Perkembangan perikanan budidaya	243,40	268,80	221,47

Tabel 1.3

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020 baik itu perikanan laut maupun perikanan budidaya semakin menurun sedangkan dari tahun 2018-2019 meningkat. Hal tersebut membenarkan bahwa covid-19 menjadi salah satu sebab menurunnya produksi perikanan pada masyarakat sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat juga menurun.

Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Selatan sebagai perpanjangan tangan atau pembantu pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki kewenangan dalam bidang perikanan, terus berupaya menanggapi hal tersebut. Dengan itu Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membuat strategi dan perencanaan yang dijalankan dalam suatu program yang menjadi

⁶²<https://news.unair.ac.id/2021/07/01/dampak-pandemi-covid-19-pada-sektor-perikanan-nasional>.

wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berupaya meningkatkan kembali perekonomian masyarakat dengan menggalakkan program yang dapat meningkatkan produksi perikanan masyarakat yang sebelumnya menurun akibat dampak covid-19. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hadi Suhaima S.Pi.,M.Si selaku Kepala bidang perikanan tangkap mengatakan bahwa :

“Selama masa pandemi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membuat program untuk pengelolaan perikanan tangkap, dimana pemerintah memberikan belanja hibah bagi para nelayan berupa barang dan juga bantuan sosial berupa uang tunai bagi nelayan dengan kategori yang memiliki perahu bermesin kapasitas dibawah 3Gr, memiliki KTP, memiliki kartu kusuka, memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan dan pos kecil. Bantuan tersebut disalurkan 100% namun bagi nelayan yang tidak memiliki pos kecil bantuannya hanya disalurkan sebesar 70%, dengan anggaran sebesar Rp 900.000.000 juta. Selain itu juga ada program budidaya perikanan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menganggarkan pembagian bantuan benih ikan, pakan ikan selanjutnya juga bantuan bioflok bagi usaha udang dan juga bantuan berupa uang untuk membeli kebutuhan kolam baik berupa bibit, pakan dan lainnya.”⁶³

Dari hasil wawancara peneliti bersama informan diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tanggap dalam menangani masalah masyarakat yang terdampak covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapat anggaran khusus yang disalurkan dari pemerintah kepada para nelayan sehingga dapat membantu nelayan yang mana sebelumnya perekonomian mereka menurun akibat pandemi covid-19.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan upaya memulihkan

⁶³ Hasil wawancara dengan Hadi Suhaima (Kepala bidang perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.

kembali perekonomian masyarakat dengan terus bergerak menyalurkan berbagai bantuan untuk nelayan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan nelayan agar lebih berdaya saing dibidang usaha penangkapan ikan meskipun dalam situasi pandemi covid-19. Hal itu sudah dirasakan oleh para nelayan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hadi Suhaima S.Pi.,M.Si :

“Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang sudah dijalankan dianggap berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama yang berprofesi nelayan. Semua bantuan yang dianggarkan dapat tersalurkan dengan baik dan telah diterima langsung oleh nelayan yang terdampak covid-19. Program yang sangat berpengaruh itu adalah pemberian hibah barang berupa jaring, fiber dan alat lain yang sangat berguna untuk nelayan dalam melakukan proses penangkapan ikan sehingga mata pencaharian nelayan masih dapat terjamin.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa progam yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan maksimal karena sudah dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak covid-19 dibidang perikanan khususnya para nelayan. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu nelayan tetap yang memiliki kapal domisili di Tapaktuan. Sebagai berikut :

“Saya majid salah satu nelayan tetap disini, biasanya saya pergi melaut itu kadang malam kadang sore selama 2 hari saya tidak pulang untuk mencari ikan. Penghasilan saya alhamdulillah cukup untuk menghidupi keluarga saya karena tapaktuan ini mudah dimana-mana ada laut. Biasanya ketika saya pulang ke daratan kapal saya ditarik bersama-sama oleh warga dan dengan cepat juga ikan yang saya dapat menjadi rebutan masyarakat karena masih segar. Namun selama pandemi ini tidak lagi seperti dulu, ketika sampai didaratan saya harus menawarkan sendiri ikan-ikan dirumah tetangga karena masyarakat tidak banyak keluar rumah. Selain itu pada masa covid-19 itu banyak orang yang di PHK beralih profesi menjadi nelayan dan itu sangat susah bagi saya. Tapaktuan ini kaya akan laut jadi banyak masyarakat yang tidak lagi bekerja memilih menjadi nelayan sehingga minat masyarakat untuk membeli ikan jadi berkurang dan

⁶⁴ Ibid

membuat pendapatan kami sebagai nelayan ini turun. Namun pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah turun tangan dengan memberikan bantuan sehingga pada masa covid-19 dulu sedikit membantu saya dalam memberi nafkah keluarga”.⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa banyak nelayan terganggu pendapatan hariannya sehingga berdampak pada perekonomian keluarga. Namun dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah dapat membantu perekonomian para nelayan sehingga meringankan beban nelayan yang mengalami kesulitan pada masa pandemi covid-19.

Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya perkembangan perikanan pada tahun 2021. Produksi perikanan dari perikanan tangkap meningkat menjadi 31.327,43 pada tahun 2021 dari 30.856,00 pada tahun 2020. Dan perikanan budidaya meningkat menjadi 255,47 pada tahun 2021 dari 221,89 pada tahun 2020.

4.2.3 Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor UMKM

Pandemi covid-19 yang terjadi diawal tahun 2020 di Kabupaten Aceh Selatan telah memutuskan segala aktivitas masyarakat dalam waktu sementara. Jumlah covid-19 yang terus meningkat sehingga mempengaruhi laju perekonomian global. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan China pada bulan desember 2019 ini ditetapkan sebagai pandemi. Sektor yang terdampak adanya covid-19 salah satunya adalah sektor UMKM, terdapat 96% UMKM yang mengalami dampak negatif pada bisnisnya dan 75% diantaranya mengalami penurunan terhadap penjualan produknya.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Abd Majid (Nelayan tetap TPI Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 30 juli 2023 bertempat di TPI Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah terjadinya penurunan permintaan dari masyarakat atau konsumen secara signifikan.⁶⁶

Banyak karyawan yang diberhentikan (PHK) karena perusahaan tidak bisa membayar gaji pegawai dan sulit mendapatkan bahan baku produksi merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan membuat para pelaku UMKM tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan banyak pelaku UMKM menutup toko-tokonya dan terjadinya penurunan omzet yang sangat drastis.

Dalam mencegah penyebaran covid-19 pemerintah pusat maupun daerah membuat kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan tersebut para pelaku UMKM tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya karena sudah ada larangan bagi masyarakat untuk berkumpul. Sehingga selama pandemi covid-19 dampaknya sangat berpengaruh terhadap para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini ditugaskan kepada Dinas UKM untuk membantu melaksanakan tugas pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi terus melakukan upaya untuk bisa pulih dan bangkit kembali dari masa covid-19 ini. Dalam masa pemulihan ekonomi pasca covid-19 pemerintah Kabupaten Aceh Selatan banyak menggalakkan program untuk mengatasi permasalahan di masyarakat.

⁶⁶ Nirmalasari, B. (2022). "Strategi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdampak Covid-19 di Kota Palopo". Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Pemerintah daerah mulai fokus mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam rangka memperkuat kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi yang produktif berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak memiliki hubungan dengan usaha kecil atau usaha besar.

Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan yaitu dari 9.556 unit pada tahun 2020, menjadi 9.644 unit pada tahun 2021. Sebagaimana data penulis uraikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	4.169	4.227	9.556	9.644
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95.8%	97,75%	99,08%	99,09%

Tabel 1.4

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 1% pada tahun 2021 menjadi 9.644 Usaha mikro dan menengah. Berkembangnya usaha mikro dan kecil tersebut telah membawa dampak yang positif bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadinya pandemi covid-19 banyak perusahaan besar yang tutup akan tetapi banyak UMKM yang tetap bertahan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Yusra, S.T selaku Kepala Dinas Bidang UKM, ia mengatakan bahwa :

“Sejak adanya covid-19 memang terjadi penurunan pendapatan yang sangat drastis dan bahkan banyak perusahaan besar yang tutup, akan tetapi hebatnya banyak UMKM yang tetap bertahan tapi pendapatan mereka memang tidak seperti yang diharapkan. Hidup memang hidup tapi pergerakan ekonominya sangat kurang. Jadi setelah dicabutnya kebijakan PSBB masyarakat kan mulai beraktivitas, pemerintah pun terus mendongkrak kembali perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa UMKM sebenarnya merupakan suatu pekerjaan yang memberi peluang besar bagi kehidupan masyarakat, disaat banyaknya pekerjaan yang gulung tikar pada masa covid-19 namun UMKM tetap dapat bertahan meskipun pendapatan yang didapat hariannya tidak sebanding dengan yang didapat sebelum adanya covid-19. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan menurun drastis.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pada tahun selanjutnya. Untuk itu pemerintah perlu menyusun strategi bagaimana memperbaiki kembali kondisi ekonomi masyarakat dengan menjalankan program-program yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat.

Strategi pemulihan ekonomi terhadap masyarakat pada sektor UMKM yang terdampak covid-19 yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yaitu adanya program pembinaan bagi pelaku UMKM pada tahun 2021, program ini ditujukan kepada pelaku UMKM baru. Tujuannya agar UMKM baru bisa

⁶⁷ Hasil wawacara dengan Yusra (Kepala Dinas Bidang UKM Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 23 April 2023 bertempat Di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

bersaing dengan pelaku UMKM yang lama untuk terus memulihkan perekonomian masyarakat yang menurun akibat covid-19.

Kemudian, adanya bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tahun 2021 bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang sejumlah 2.500.000 secara sekaligus dari pemerintah pusat, bantuan tersebut didapat apabila sudah memiliki legalitas usaha. Sedangkan bantuan dari pemerintah daerah diberikan dalam bentuk uang sejumlah 900.000 yang dikirim langsung dalam rekening penerima, bantuan ini disebut dana hibah diperuntukkan pada masyarakat yang kurang mampu.

Hal diatas Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Yusra, S.T selaku Kepala Dinas Bidang UKM, ia mengatakan bahwa :

“Ada beberapa program sejak adanya pemulihan ekonomi pasca covid-19 pada tahun 2021 yang sudah direalisasikan pemerintah. Pertama ada program pembinaan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, kedua adanya penyuluhan untuk pendampingan UMKM yang bertugas memberi masukan kepada UMKM yang mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) atau legalitas usaha. Ketiga adanya bantuan baik dari pemerintah daerah juga dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah itu disebut dana hibah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha. Bantuan tersebut diberikan sesuai proposal yang diberikan jauh-jauh hari lalu pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini ditugaskan kepada Dinas UKM untuk turun langsung ke lapangan dan telah diberikan kepada 1.500 UMKM dengan nominal sebesar Rp.900.000 yang langsung dikirim ke rekening yang bersangkutan. Sedangkan dari pemerintah pusat ada bantuan dana yang disebut dengan BPUM yang diberikan kepada UMKM yang telah mengirim datanya ke Dinas UKM dana tersebut diberikan sebesar Rp 2.500.000. yang terakhir ada program pelatihan peningkatan mutu, kita di Aceh Selatan ini ada kerajinan keripik di Pasie Raja, pada awalnya mereka menjual secara mentah dan itu sangat kurang minat dari pembeli jika dijadikan sebagai oleh-oleh. Nah jadi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mendatangkan instruktur dari sumatra utara untuk melatih para pengrajin ubi agar meningkatkan mutu dan kualitas produknya.”⁶⁸

⁶⁸ Ibid

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah merealisasikan program dengan baik untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang sebelumnya anjlok akibat covid-19. Semakin banyaknya masyarakat yang mengurus legalitas usaha semakin meningkatnya UMKM dan hal itu sangat berdampak positif, ketika masyarakat sudah memiliki usaha menandakan bahwa masyarakat bisa mandiri.

Selanjutnya bagi pengrajin ubi yang sebelumnya mereka hanya memproduksi dan menjual bahan mentah yang kurang minat pembeli dengan adanya program pemerintah berupa adanya pelatihan peningkatan mutu membuat para pengrajin ubi tersebut bisa menjual dan menjangkau pasar lebih banyak lagi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Yusra, S.T selaku Kepala Dinas Bidang UKM, ia mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah semua program yang ibu sebutkan tadi sudah sangat membantu masyarakat khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Jadi pada masa covid-19 itu boleh dikatakan UMKM kita mati suri, jadi setelah adanya bantuan-bantuan yang diberikan alhamdulillah bisa meningkatkan kembali ekonomi masyarakat dan saat ini dapat dirasakan, jadi masyarakat sudah memproduksi lagi seperti pengrajin ubi itu bahkan mereka sudah menjual produknya sampai keluar daerah jadi pasarnya semakin berkembang.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa semua program yang direalisasikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar RP. 2.613.008.775. sehingga dari bantuan yang telah disalurkan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tidak hanya berdampak pada

⁶⁹ ibid

bertambahnya UMKM tapi juga dibuktikan dengan meningkatnya angka PDRB laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yaitu sebesar 3,11% dari 2,46% pada tahun 2021.

Berdasarkan kebijakan yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mendukung UMKM yang terdampak covid-19. Kebijakan tersebut diatur melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang merupakan amanat dari perpu nomor 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM.⁷⁰

4.2.4 Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah wisata syariah dimana sejarahnya Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah yang kental dengan budaya dan tradisi islam dan banyak peristiwa legenda zaman dulu. Kabupaten Aceh Selatan yang berada di wilayah pantai barat pulau sumatera kaya akan objek wisata alam seperti pantai, air terjun, dan pemandian umum.⁷¹

Potensi pariwisata Kabupaten Aceh Selatan tersebar relatif merata diseluruh wilayah hampir disetiap Gampong memiliki wisata yang masih sangat alami dari pegunungan dan pantai. Disepanjang jalan disuguhkan dengan tempat wisata menakjubkan yang terdiri dari teluk yang indah dengan pasir putih dan bersih. Selain itu lautnya yang memiliki berbagai jenis ikan dan terumbu karang dapat

⁷⁰ <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/385/257/> diakses pada 24 Maret 2023 11.06 wib

⁷¹ Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2022(Hal:25)

dijadikan objek wisata bahari. Hutannya yang masih perawan yang ditanami dengan kebun pala masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai objek ekoturisme.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki sejumlah situs sejarah, kesenian budaya dan adat istiadat tradisional yang layak dijual. Objek wisata di Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan. Setiap wisatawan yang berkunjung disuguhkan dengan beragam macam makanan citarasa khas daerah tujuannya agar mampu menarik minat wisatawan untuk terus berkunjung ke Aceh Selatan.⁷² Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung. namun pada tahun 2020 kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang disebabkan karena pandemi covid-19.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang terdampak covid-19, sejak berlakunya PSBB berbagai lokasi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan sepi akan pengunjung karena kegiatan kepariwisataan ditutup total pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan fakta bahwa para pelaku industri pada sektor pariwisata banyak yang mengeluh karena adanya covid-19 membawa dampak buruk terhadap perekonomian mereka. Seperti karyawan hotel dan restoran yang berada dekat dengan tempat wisata sebagian dari mereka banyak yang dirumahkan karena berkurangnya pengunjung dan berakibat berkurangnya pendapatan yang mereka terima.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Muchsin S.T selaku kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan. Beliau mengatakan bahwa :

“Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai akhir 2021 kita masih dilanda pandemi, akan tetapi untuk aktivitas kepariwisataan mulai dijalankan

⁷² Qanun hal IV-3

kembali dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Akan tetapi berbeda halnya pada tahun 2020 dimana angka positif covid-19 yang semakin meningkat kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menutup total semua kegiatan pariwisata jadi tidak ada aktivitas pada tahun itu sehingga berdampak buruk bagi masyarakat karena tidak diperbolehkan adanya pengunjung dari luar yang berwisata ke Aceh Selatan”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pendapatan masyarakat menurun bahkan banyak yang dirumahkan akibat diberhentikan secara total kegiatan pariwisata sehingga pada tahun 2020 tidak ada pengunjung dari luar yang berwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Selain menurunnya perekonomian masyarakat juga berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuka kembali kegiatan pariwisata pada tahun 2021 seiring menurunnya angka pertumbuhan covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan fakta bahwa Seiring dengan menurunnya angka positif covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan, pada tahun 2021 pemerintah menghidupkan kembali kegiatan kepariwisataan dari desa dan kecamatan, hampir disetiap Kecamatan memiliki destinasi wisata yang bermodalkan alam yang indah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Muchsin S.T selaku kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan. Beliau mengatakan bahwa :

“Pasca menurunnya angka covid-19 kami selaku pemerintah melakukan upaya untuk menghidupkan kembali kepariwisataan dari desa dan

⁷³ Hasil wawancara dengan Muchsin (Kepala Dinas Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 02 Mei 2023 bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.

kecamatan. Di Kabupaten Aceh Selatan ini terdapat 18 Kecamatan dan 260 Desa, hanya bermodalkan alam yang indah hampir disetiap kecamatan terdapat destinasi wisata. Pertama itu Kami mencoba melakukan promosi pariwisata seperti dengan mengikuti ajang perlombaan ditingkat nasional ajang pesona Indonesia, dan Alhamdulillah Kabupaten Aceh Selatan sudah 2 tahun berturut-turut menanag sebagai juara 1. Dan yang kedua kami juga memberi dorongan kepada pelaku UMKM untuk bergerak kembali seperti sebelum terjadinya covid-19. Harapan dari berjalannya program ini dapat menarik kembali pengunjung untuk berwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Dan Alhamdulillah indikasinya dapat dilihat dari jumlah penginapan mulai penuh lagi dan jumlah pengunjung mencapai 52.000 yang berkunjung ke Aceh Selatan”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pasca menurunnya angka positif covid-19 pemerintah terus melakukan upaya untuk dapat memperbaiki perekonomian masyarakat dan mendatangkan kembali wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Selatan pasca berakhirnya covid-19. Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan pada sektor pariwisata pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar RP.2.075.611.044.

⁷⁴ ibid

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Virus covid-19 begitu cepat menyebar bahkan hampir seluruh dunia, tak heran hingga Indonesia pun merasakan dampaknya termasuk Kabupaten Aceh Selatan. Dampak Covid-19 bukan hanya pada aspek kesehatan saja, tetapi juga pada aspek ekonomi yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2020 sangat turun drastis akibat dampak covid-19 dan Aceh Selatan pernah menjadi zona merah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam masalah ini untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang terdampak covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Kesehatan adalah adanya penyuluhan kesehatan dengan memberi bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan memberikan anggaran bagi masyarakat yang terdampak covid-19 berupa anggaran gizi buruk untuk bayi, dan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan lansia.
2. Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Perikanan adalah memberikan belanja hibah bagi para nelayan berupa barang dan juga

bantuan sosial berupa uang tunai untuk membeli kebutuhan kolam baik berupa bibit, pakan dan lainnya.

3. Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor UMKM adalah : Pertama ada program pembinaan kepada UMKM, kedua adanya penyuluhan untuk pendampingan UMKM. Ketiga adanya bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan BPUM dan bantuan dari pemerintah daerah disebut dana hibah.
4. Strategi Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata adalah : melakukan promosi pariwisata dengan mengikuti ajang perlombaan pesona Indonesia, dan memberi dorongan kepada pelaku UMKM untuk bergerak kembali meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.

5.2 Saran

1. Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan masukan bagi pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan khususnya dalam menganalisis pemulihan ekonomi pada sektor yang terdampak pasca covid-19.
2. Bagi masyarakat atau mahasiswa diharapkan mampu memberi pemahaman sekaligus motivasi terkait strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi peneliti hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan untuk menganalisis tentang pemulihan ekonomi pasca covid-19

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik [BPS]. 2023. *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2022*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.

Bappeda, 2022. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Selatan 2023

Conny R. Semiawan. (2010). *Metode penelitian kualitatif* . Jakarta: Grasindo.

Deddy Mulyana. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fandy Tjiptono. 2019. *Strategi Pemasaran Prinsip dan Penerapan*. Edisi I. (Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Mulgan, Geoff. 2009. *The Art of Public Strategy : Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. New York: Oxford University Press Inc.

Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Selatan 2022

Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung : Pustaka Setia.

Suwarsono, Muhammad. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Veithzal Rivai, Zainal dkk. 2020. *Manajemen Strategis: Strategi Bersaing Islami*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

Aldyanata, Muhammad Rizqon. 2021. *Strategi yayasan Wafizs Al Amin Center dalam meningkatkan kuantitas jama'ah: Studi kasus pada yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi* (Doctoral dissertation: UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Armelia, Maghvira dan Zaili, Rusdi. 2021. *Strategi Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Daerah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama*

Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Pekanbaru.
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(3)

Cut Medika, Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto. 2018. *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu komunikasi.* Diakom:Jurnal Media dan Komunikasi 1.2

Dani, Rahmaddian. 2021. *Aktivitas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inhu.* Doctoral dissertation: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Juliyanto, I. T. 2015. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dearah Operasi VII Madiun).* Doctoral dissertation: Universitas Brawijaya.

Mikial, Bulkia. 2022. *Public Disobedience Dan Covid-19 (Studi Kasus:Aceh Besar).* BandaAceh: FISIP UIN AR-Raniry, Skripsi.

Nailul Mona. 2020. *Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia).* Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol. 2, No.2.

Nirmalasari, B. 2022. *Strategi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdampak Covid-19 di Kota Palopo.* Doctoral Dissertation: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Rafika Ismawati. 2017. *Strategi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Kesehatan Lingkungan di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang).* Tanjung pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Rizki, Zahrul. 2022. *Evaluasi Upaya Pemerintah Terhadap Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.* doctoral dissertation: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. 2019. *Metode penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan.* Jurnal Informasi Kimia dan Pemodelan

Sri Ayu Lestari. 2021. *Strategi Pemulihan Ekonomi Pariwisata Di Masa Pandemi*

Covid-19 Studi Kasus Dinas Pariwisata Kota Mataram. Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram.

Sutrisno, Edy. 2021. *Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata.* Jurnal Lemhannas RI. 9(1)

Toding, Apriana, Petrus Peleng Roreng, dan Ierthin Palullungan. 2021. *Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19.* Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar.1(1)

Regulasi

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019.

Website

<http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1181-dampak-covid-19-dalam-bidang-kesehatan>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/32437/masyarakat-dan-pemerintah-bersama-tekan-penularan-covid-19-lewat-protokol-kesehatan/0/virus_corona.

<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/385/257/>

<http://repo.uinsatu.ac.id/23265/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada 12 April 2023 00.25)
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2739>

<https://thetapaktuanpost.com/kategori/pemerintah/kelesuan-ekonomi-dimasa-pandemi-covid-19-faktor-utama-menurunnya-pada-aceh-selatan/amp/>

<https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/09/01/969/banda-aceh-dan-aceh-besar-kini-jadi-zona-oranye-298-pasien-covid-19-sembuh.html>

<https://news.unair.ac.id/2021/07/01/dampak-pandemi-covid-19-pada-sektor-perikanan-nasional>.

<https://inspektorat.acehselatankab.go.id/dokumen/8ca508ab-c283-43b4-9106-4d95902ef56b>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/266704/Perbup%202021-12.pdf>

https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/TH_Pemulihan-Ekonomi-Nasional_reviu.pdf

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022>

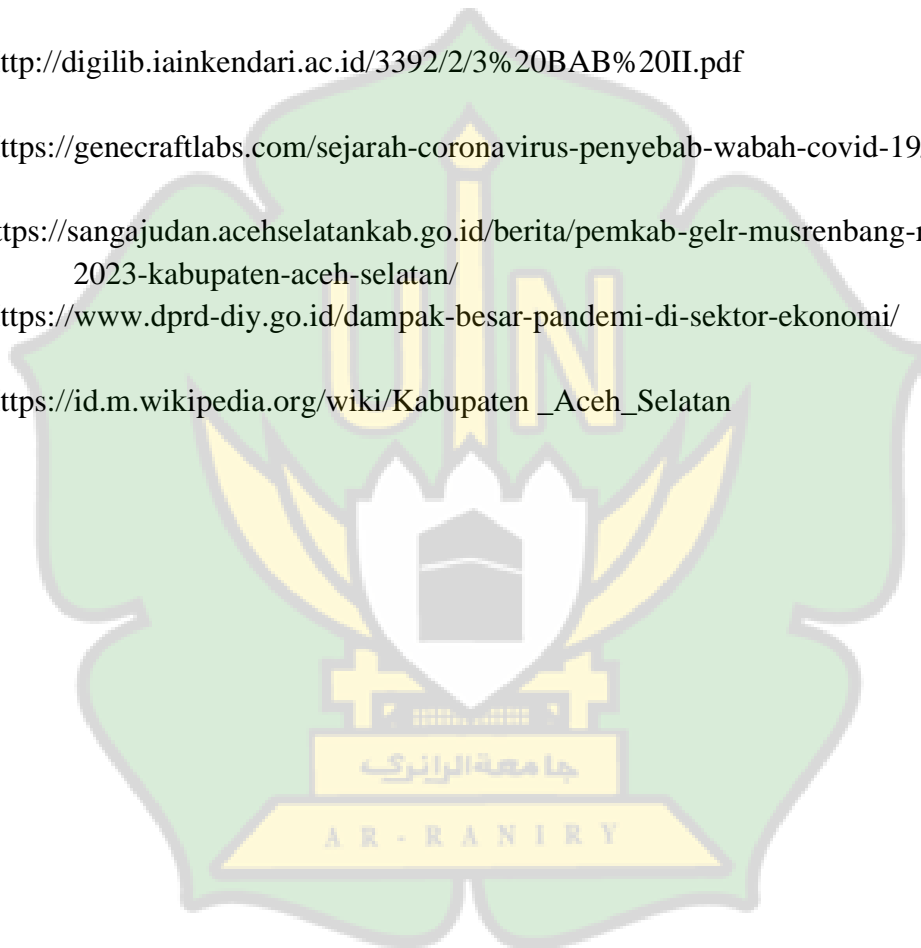
<http://digilib.iainkendari.ac.id/3392/2/3%20BAB%20II.pdf>

<https://genecraftlabs.com/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>

<https://sangajudan.acehselatankab.go.id/berita/pemkab-gelr-musrenbang-rkpd-2023-kabupaten-aceh-selatan/>

<https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan



LAMPIRAN



Gambar 1.3

Wawancara dengan Kepala
bidang perikanan tangkap



Gambar 1.4

Wawancara dengan kepala dinas
UKM



Gambar 1.5

Wawancara dengan Kepala
Dinas Pariwisata



Gambar 1.6

Wawancara dengan sekretaris
dinas kesehatan